

Sekolah Inklusif

Dasar Pemikiran dan Gagasan Baru untuk Menginklusi
Pendidikan Anak Penyandang Kebutuhan Khusus
Di Sekolah Reguler

Disajikan pada
Penyuluhan Guru-guru SD Citepus 1-5
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
Dalam Program Pengabdian Masyarakat
Dosen Jurusan PLB, FIP, UPI



Oleh
Didi Tarsidi

Jurusan Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia
Bandung
Oktober 2001

Sekolah Inklusif:
Dasar Pemikiran dan Gagasan Baru untuk Menginklusi
Pendidikan Anak Penyandang Kebutuhan Khusus
Di Sekolah Reguler

Drs. Didi Tarsidi

I. Pendahuluan

1.1. Hak setiap anak atas pendidikan dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (PBB, 1948) dan secara kuat dipertegas oleh Deklarasi Dunia tentang Pendidikan bagi Semua (UNESCO, 1990), yang antara lain mengatakan bahwa setiap penyandang cacat berhak menyatakan keinginannya sehubungan dengan pendidikannya, sejauh hal tersebut dapat difahami; dan orang tua berhak untuk dikonsultasi mengenai bentuk pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan aspirasi anaknya.

1.2. Kerangka Aksi mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus (Unesco, 1994) mengakui prinsip bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak kaum buruh, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok masyarakat minoritas secara linguistik, etnik ataupun budaya. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi sistem persekolahan.

Dalam konteks Kerangka Aksi tersebut, istilah "kebutuhan pendidikan khusus" mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan atau kesulitan belajarnya. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Terdapat satu konsensus internasional bahwa anak dan remaja yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya tercakup dalam perencanaan pendidikan yang dibuat untuk anak pada umumnya. Hal tersebut telah membawa kita pada konsep sekolah inklusif. Tantangan yang dihadapkan pada sekolah inklusif adalah bahwa sekolah harus mengembangkan satu pedagogi yang berpusat pada diri anak, yang mampu berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Keuntungan dari sekolah semacam ini bukan hanya mampu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak; penyelenggaraan sekolah tersebut juga akan merupakan langkah yang sangat penting dalam membantu mengubah sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah dan menciptakan masyarakat inklusif. Perubahan dalam pandangan sosial merupakan satu keharusan. Sudah terlalu lama permasalahan yang dihadapi para penyandang cacat diperparah oleh sikap negatif masyarakat yang perhatiannya lebih difokuskan pada kecacatannya, bukan pada potensinya.

1.3. Pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat yang dapat menguntungkan semua anak. Pendidikan kebutuhan khusus berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya dan bahwa oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. Pedagogi yang berpusat pada diri anak itu menguntungkan bagi semua siswa dan pada gilirannya menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengalaman telah menunjukkan bahwa hal tersebut dapat sangat mengurangi angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan sekaligus juga menjamin tercapainya tingkat prestasi rata-rata yang lebih tinggi. Suatu pedagogi yang berpusat pada diri anak dapat membantu menghindarkan penghamburan sumber-sumber dan mencegah pudarnya harapan-harapan yang sangat sering merupakan konsekuensi dari kualitas pengajaran yang buruk dan mentalitas pendidikan "satu ukuran pas untuk semua". Lebih jauh, sekolah yang berpusat pada diri anak merupakan tempat berlatih yang baik bagi masyarakat untuk menghargai adanya perbedaan-perbedaan serta menjunjung harga diri semua umat manusia.

II. PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BARU DALAM Bidang PENDIDIKAN KEBUTUHAN KHUSUS

2.1. Kecenderungan dalam kebijakan sosial global selama dua dasa warsa terakhir ini adalah meningkatkan integrasi dan partisipasi serta memerangi eksklusivitas (keterpisahan).

Inklusi (ketercakupannya) dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting bagi harga diri manusia serta memungkinkan orang menikmati dan mempraktekkan hak-hak azasinya sebagai manusia. Di dalam bidang pendidikan, hal tersebut tercermin dalam pengembangan strategi-strategi yang berusaha memberikan kesamaan kesempatan yang sesungguhnya.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa integrasi anak dan remaja penyandang kebutuhan pendidikan khusus tercapai dengan sebaik-baiknya apabila mereka ditempatkan di sekolah inklusif yang melayani semua anak di masyarakatnya.

Dalam konteks inilah mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus dapat sepenuhnya mencapai kemajuan pendidikan dan integrasi sosial.

Sementara sekolah inklusif memberikan lingkungan yang tepat guna mencapai kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh, keberhasilannya menuntut usaha bersama, bukan hanya dari guru-guru dan staf sekolah, tetapi juga dari teman sebayanya, orang tua, keluarga dan relawan. Reformasi institusi sosial bukan merupakan pekerjaan teknis semata; melainkan, di atas segalanya, tergantung pada keyakinan, komitmen dan niat baik dari para individu anggota masyarakat yang bersangkutan.

2.2. Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka.

Sekolah inklusif harus mengenali dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber-sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.

2.3. Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa - atau kelas khusus atau unit khusus di sebuah sekolah reguler - seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

2.4. Situasi pendidikan kebutuhan khusus sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya, terdapat sejumlah negara yang mempunyai sistem sekolah luar biasa yang tertata dengan baik bagi penyandang kecacatan tertentu. SLB semacam ini dapat dijadikan sumber yang sangat baik bagi pengembangan sekolah inklusif. Staf di institusi-institusi khusus seperti ini memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk deteksi dan identifikasi dini anak-anak penyandang cacat.

SLB juga dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pusat sumber bagi staf di sekolah reguler. Akhirnya, SLB - atau unit-unit tertentu di sekolah inklusif - dapat terus memberikan pendidikan yang paling cocok bagi sejumlah kecil anak penyandang cacat yang tidak dapat dilayani secara memadai di kelas atau sekolah reguler. Investasi di SLB-SLB yang ada seyogyanya diarahkan ke perannya yang baru dan lebih besar sebagai penyedia dukungan profesional bagi sekolah-sekolah reguler dalam memenuhi kebutuhan pendidikan khusus. Satu kontribusi yang penting kepada sekolah-sekolah reguler, yang dapat diberikan oleh staf SLB, adalah mencocokkan isi kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan individual murid.

2.5. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem pendidikan segregasi (SLB) menuntut biaya tinggi dan hanya mampu melayani sebagian kecil saja anak penyandang kebutuhan khusus. Di pihak lain, pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa sekolah inklusif yang melayani semua anak di lingkungan masyarakatnya, sangat berhasil dalam menggalang dukungan dari masyarakat dan dalam menemukan cara-cara yang imajinatif dan inovatif untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas secara lebih efektif dan lebih efisien.

III. PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN PENGORGANISASIAN

Untuk mewujudkan sekolah inklusif, seyogyanya diambil kebijakan-kebijakan dan ditempuh langkah-langkah pengorganisasian sistem pendidikan sebagai berikut.

3.1. Pendidikan terpadu (*integrated education*) dan rehabilitasi berbasis masyarakat (*community-base rehabilitation*) merupakan pendekatan-pendekatan pelengkap dan pendukung bagi pelayanan terhadap penyandang kebutuhan khusus. Keduanya didasarkan atas prinsip-prinsip inklusi, integrasi dan partisipasi, dan merupakan pendekatan-pendekatan yang sudah teruji kebaikannya serta efektif dalam pembiayaannya untuk meningkatkan kesamaan akses bagi mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus, sehingga perlu tetap dipertahankan sebagai bagian dari satu strategi nasional yang ditujukan untuk mewujudkan Pendidikan bagi Semua.

3.2. Peraturan perundang-undangan seyogyanya mengakui prinsip kesamaan kesempatan bagi anak, remaja maupun dewasa penyandang cacat dalam pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, yang dilaksanakan secara terintegrasi, selama hal itu memungkinkan.

3.3. Langkah-langkah legislatif yang paralel dan bersifat melengkapi seyogyanya diambil dalam bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, latihan kerja serta penempatan kerja untuk mendukung peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan.

3.4. Kebijakan pendidikan pada semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, seyogyanya menetapkan bahwa seorang anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungannya, di sekolah yang akan dimasukinya seandainya dia tidak cacat. Kekecualian pada peraturan ini seyogyanya dipertimbangkan atas dasar kasus per kasus, apabila hanya pendidikan pada SLB atau perpantian yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan individual anak tersebut.

3.5. Praktek pengintegrasian anak penyandang cacat di sekolah reguler seyogyanya merupakan bagian yang integral dari perencanaan nasional untuk mewujudkan Pendidikan bagi Semua. Bahkan dalam kasus-kasus kekecualian di mana anak ditempatkan di SLB, pendidikan mereka tidak harus seluruhnya terpisah dari pendidikan reguler. Kehadiran mereka secara paruh waktu di sekolah reguler seyogyanya dianjurkan.

3.6. Hambatan-hambatan yang menghalangi peralihan dari sistem sekolah khusus (SLB) ke sekolah reguler seyogyanya ditiadakan, dan struktur administrasi yang mencakup keduanya hendaknya diwujudkan.

3.7. Koordinasi antara para pejabat pendidikan dan mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, penempatan kerja dan pelayanan sosial

seyogyanya diperkuat pada semua tingkatan agar terfokus pada sasaran yang sama dan saling melengkapi. Perencanaan dan koordinasi juga seyogyanya mempertimbangkan potensi dan peran nyata yang dapat dimainkan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Satu upaya khusus perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan khusus.

IV. Pengaturan Kurikulum dan Manajemen SEKOLAH

4.1. Mengembangkan sekolah inklusif yang dapat melayani sejumlah besar siswa di daerah perkotaan maupun pedesaan menuntut adanya:

- Penetapan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai inklusi disertai penyediaan dana yang memadai;
- Upaya penerangan masyarakat yang efektif untuk memerangi purbasangka dan menciptakan pemahaman serta sikap positif;
- Program orientasi dan pelatihan staf yang ekstensif; dan
- Penyediaan berbagai layanan pendukung yang diperlukan.

4.2. Perubahan dalam semua aspek persekolahan berikut ini, maupun dalam banyak aspek lainnya, diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan sekolah inklusif: kurikulum, bangunan, organisasi sekolah, pedagogi, asesmen, personalia, etos sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

4.3. Sebagian besar dari tuntutan perubahan tersebut tidak secara khusus berhubungan dengan inklusi anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Perubahan-perubahan tersebut merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya serta untuk mempertinggi tingkat prestasi belajar semua siswa. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan bagi Semua menegaskan perlunya pendekatan yang berpusat pada diri anak yang ditujukan untuk menjamin keberhasilan pendidikan bagi semua anak. Penetapan sistem yang lebih fleksibel dan lebih adaptif yang mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan anak secara lebih penuh akan merupakan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan maupun inklusi.

4.4. Kurikulum seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Oleh karena itu sekolah seyogyanya memberikan kesempatan kurikuler yang disesuaikan dengan anak yang memiliki bermacam-macam kemampuan dan minat.

4.5. Anak penyandang kebutuhan khusus seyogyanya memperoleh dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Prinsip yang dijadikan pedoman seyogyanya adalah memberi pendidikan yang sama kepada semua anak, dengan memberikan bantuan dan dukungan tambahan bagi anak yang memerlukannya.

4.6. Bagi anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus, seyogyanya disediakan dukungan yang berkesinambungan, yang berkisar dari bantuan minimal di kelas reguler hingga program pelajaran tambahan di sekolah itu dan, bila perlu, diperluas dengan penyediaan bantuan dari guru spesialis dan staf pendukung eksternal.

4.7. Teknologi yang tepat dengan biaya terjangkau seyogyanya dipergunakan bila diperlukan untuk mempertinggi keberhasilan dalam kurikulum sekolah dan untuk membantu komunikasi, mobilitas dan belajar. Bantuan teknis dapat diberikan secara lebih ekonomis dan efektif jika disediakan dari sebuah pusat sumber yang didirikan di setiap wilayah, di mana terdapat tenaga ahli yang dapat mencocokkan jenis alat bantu dengan kebutuhan individu dan menjamin pemeliharannya.

4.8. Administrator daerah dan para kepala sekolah dapat memainkan peran utama dalam menjadikan sekolah-sekolah agar lebih responsif terhadap anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus jika mereka diberi wewenang yang diperlukan dan pelatihan yang memadai untuk berbuat demikian. Mereka seyogyanya diminta untuk mengembangkan prosedur manajemen yang lebih fleksibel, mengatur kembali penyaluran sumber-sumber pembelajaran, memperbanyak pilihan pelajaran, menggalakkan bantuan dari anak ke anak, menawarkan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dan mengembangkan hubungan yang erat dengan orang tua dan masyarakat. Keberhasilan manajemen sekolah tergantung pada keterlibatan yang aktif dan kreatif dari para guru serta staf sekolah, dan pengembangan kerjasama dan kerja tim yang efektif untuk memenuhi kebutuhan para siswa.

4.9. Kepala sekolah mempunyai satu tanggung jawab khusus dalam meningkatkan sikap yang positif di seluruh masyarakat sekolahnya dan dalam mengatur kerjasama yang efektif antara guru kelas dan staf pendukung. Pengaturan yang tepat atas faktor-faktor pendukung dan peran pasti yang harus dimainkan oleh berbagai mitra kerja dalam proses pendidikan seyogyanya ditetapkan melalui konsultasi dan negosiasi.

4.10. Setiap sekolah seyogyanya merupakan sebuah masyarakat yang secara kolektif bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan setiap siswanya. Tim pendidikan, bukannya guru-guru secara individu, seyogyanya berbagi tanggung jawab atas pendidikan anak-anak penyandang kebutuhan khusus. Orang tua dan relawan seyogyanya diundang untuk mengambil peran aktif dalam pekerjaan sekolah. Namun demikian, guru memegang peran kunci sebagai manajer proses pendidikan, membantu anak dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia baik di dalam maupun di luar kelas.

V. Kesimpulan

Secara garis besar, sistem pendidikan inklusif memiliki keuntungan-

keuntungan sebagai berikut:

1. Sekolah inklusif akan merupakan inti pengembangan masyarakat inklusif yang non-diskriminatif, kooperatif, solider dan saling menghargai sesama anggota masyarakat tanpa memandang perbedaan-perbedaan individual, termasuk perbedaan yang diakibatkan oleh kecacatan, sehingga akan tercipta masyarakat yang ramah bagi semua orang.
2. Penyelenggaraan sekolah inklusif dapat memberikan layanan pendidikan kepada lebih banyak anak penyandang kebutuhan khusus dengan biaya yang lebih efisien.

Sekolah inklusif akan terselenggara dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih inklusif, fasilitatif dan non-diskriminatif;
- b. Kesadaran dan sikap masyarakat umum terhadap kesamaan hak yang sesungguhnya bagi setiap warga, termasuk warga penyandang cacat, dalam setiap aspek hidup dan kehidupan bermasyarakat.
- c. Fleksibilitas kurikulum agar sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan individual setiap anak dalam proses belajarnya;
- d. Guru-guru reguler yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar tentang layanan bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. Pusat sumber yang menyediakan peralatan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak penyandang kebutuhan khusus di sekolah reguler;
- f. Pusat layanan yang menyediakan bantuan khusus bagi guru-guru reguler dalam melayani anak berkebutuhan khusus.

Pusat sumber dan pusat layanan tersebut dapat dikembangkan dari SLB yang ada, dan upaya yang sistematis sudah mulai dilakukan ke arah itu.